

Efektivitas Fungsi Pemerintahan dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi di Indonesia

Siti Annisa^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT Democracy as an ideal system of government faces various challenges to maintain its stability. One of the main factors that determine the stability of democracy is the effectiveness of government. This study examines the effectiveness of government in maintaining the stability of democracy by reviewing various aspects, such as accountability, transparency, responsiveness, and public participation. This journal aims to investigate the effectiveness of government in maintaining the stability of democracy. Democracy is a political system based on the active participation of citizens, protection of human rights, and responsible government. The stability of democracy is seen as an important factor that ensures the progress and sustainability of society. This study uses a qualitative approach by analyzing a series of relevant case studies to gain a deeper understanding of how government effectiveness affects the stability of democracy in diverse contexts.	CONTACT 230801007@student.ar-raniry.ac.id
ABSTRAK Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang ideal menghadapi berbagai tantangan untuk menjaga stabilitasnya. Salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas demokrasi adalah efektivitas pemerintahan. Kajian ini mengkaji efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi dengan meninjau berbagai aspek, seperti akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, dan partisipasi masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang didasarkan pada partisipasi aktif warga negara, perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggungjawab. Stabilitas demokrasi dipandang sebagai faktor penting yang menjamin kemajuan dan kelangsungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis serangkaian studi kasus yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana efektivitas pemerintahan mempengaruhi stabilitas demokrasi dalam konteks yang beragam.	KEYWORDS Efektivitas, Pemerintahan, Stabilitas Demokrasi Received: 28/03/2024 Revised: 28/03/2024 Accepted: 20/04/2024 Online: 30/04/2024 Published: 30/04/2024
Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)	

INTRODUCTION

Efektivitas pemerintahan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas demokrasi. Efektivitas mencakup kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Dahl membahas berbagai aspek demokrasi, termasuk persyaratan untuk demokrasi yang efektif, tantangan yang dihadapi demokrasi, dan cara-cara untuk memperkuat demokrasi. Dalam bukunya "On Democracy", Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana warga negaranya memiliki kontrol atas keputusan pemerintah. Dahl menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Menurutnya, demokrasi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Persamaan politik, partisipasi politik yang efektif, kontes politik yang terbuka, kebebasan berekspresi, dan sumber daya yang independent (Dahl, 1967).

Dalam buku "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Acemoglu dan Robinson mengemukakan teori tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi. Mereka berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara bergantung pada institusi politik dan ekonominya (Smith, 2012). Teori Acemoglu dan Robinson memiliki beberapa implikasi penting untuk efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi, dimana pemerintahan yang inklusif lebih akuntabel kepada rakyatnya dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan legitimasi pemerintahan. Pemerintahan yang inklusif lebih mampu untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menegakkan hukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintahan yang inklusif lebih mungkin untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan. Hal ini memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga negara. Secara keseluruhan,

teori Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi bergantung pada tingkat inklusivitas institusi politik dan ekonomi (Dahl, 1967).

Dalam bukunya "Developing Democracy: Toward Consolidation", Larry Diamond mengemukakan beberapa teori tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi; konsolidasi demokrasi, legitimasi dan akuntabilitas, kapasitas pemerintahan, partisipasi politik, dan masyarakat sipil yang kuat. Diamond juga menekankan pentingnya masyarakat sipil yang kuat dalam menjaga stabilitas demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat dapat memantau kinerja pemerintah, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan mendorong demokrasi. Teori Diamond tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi bersifat komprehensif dan mencakup berbagai faktor. Teori ini bermanfaat untuk memahami tantangan yang dihadapi demokrasi dan cara-cara untuk memperkuat demokrasi (Leftwich, 2000).

Dalam bukunya "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century", Samuel P. Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Huntington menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Menurutnya, demokrasi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Persamaan politik, dimana semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Ada juga partisipasi politik yang efektif, disini warga negara harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kontes politik yang terbuka, mereka harus ada persaingan yang terbuka dan bebas untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kemudian, ada kebebasan berekspresi, dimana warga negara harus bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut (Pierre & Huntington, 1992).

Menurut Arend Lijphart mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik di mana rakyat memiliki kendali atas pemerintah. Lijphart menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Menurutnya, demokrasi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Persamaan politik: Semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik yang efektif: Rakyat harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kontes politik yang terbuka: Harus ada persaingan yang terbuka dan bebas untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kebebasan berekspresi: Rakyat harus bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut, dan Sumber daya yang independen: Harus ada sumber daya yang independen, seperti media massa dan peradilan, yang dapat mengawasi pemerintah (Lijphart, 2012).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai studi kasus yang relevan (Ahyar et al., 2020; Ivanovich Agusta, 2014). Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari laporan penelitian, pengajar, dan studi kasus sebelumnya yang telah dilakukan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi. Pendekatan kualitatif mengacu pada strategi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang kompleks, menggunakan data non-numerik seperti teks, gambar, dan video. Studi kasus, yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang paling umum digunakan, difokuskan pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh dari berbagai perspektif, memungkinkan penemuan wawasan mendalam tentang masalah yang diteliti (Yin., 2014).

RESULTS

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara sebagai fondasi bagi kegiatan masyarakat dan pemerintahan mereka. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama: pertama, hampir semua negara mengakui demokrasi sebagai prinsip yang sangat penting; kedua, demokrasi

memberikan arahan bagi partisipasi masyarakat dalam mengelola negara sebagai otoritas tertinggi. Secara etimologis, istilah "demokrasi" memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "cratos" yang merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi secara harfiah menggambarkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan atau otoritas tertinggi berada di tangan rakyat atau masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik serta pemegang kekuasaan yang berasal dari rakyat itu sendiri, bukan dari segelintir elit atau golongan tertentu. Dengan demikian, demokrasi merupakan representasi langsung dari kehendak dan kepentingan masyarakat dalam pengaturan urusan publik. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah mencerminkan kondisi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan puncak dicapai melalui keputusan bersama masyarakat, serta pemerintahan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah prinsip yang menegaskan hak partisipasi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik, menjadikannya fondasi yang penting bagi masyarakat yang demokratis (Sholikin, 2021).

Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur negara mereka sendiri melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini adalah konsep penting yang mendasari banyak tatanan sosial dan politik di seluruh dunia. Menurut Scott Mainwaring dan Timothy R. Scully, meskipun demokrasi telah berkembang pesat di Amerika Latin sejak tahun 1980-an, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam stabilitasnya. Meskipun banyak negara telah mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, demokrasi di kawasan ini tetap rentan dan mudah tergoyahkan. Tantangan utamanya meliputi tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, korupsi yang merajalela, kelemahan dalam institusi demokrasi, serta kekuatan yang masih dimiliki oleh militer. Untuk membangun demokrasi yang kokoh di Amerika Latin, Mainwaring dan Scully menyoroti beberapa syarat penting, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, pemberantasan korupsi, penguatan institusi demokrasi, dan pengawasan sipil terhadap militer. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan tersebut, upaya serius dan komprehensif diperlukan untuk memperkuat fondasi demokrasi di Amerika Latin (Maxwell et al., 1995).

Dalam bukunya "Political Man: The Social Bases of Politics", Seymour Martin Lipset menggarisbawahi pentingnya efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Menurut Lipset, demokrasi yang stabil memerlukan pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan dan tuntutan rakyat serta mengatasi masalah publik. Untuk mencapai efektivitas, Lipset menyoroti beberapa faktor kunci, antara lain, legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan umum yang adil, kemampuan pemerintahan untuk menjalankan kebijakannya dengan sumber daya yang memadai, dan akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan stabilitas demokrasi, pemerintahan yang efektif dan akuntabel sangatlah penting (Almond & Lipset, 1960).

Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin mereka dan mengubah pemerintahan secara damai. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga menciptakan representasi yang lebih luas atas kepentingan masyarakat. Kemampuan untuk mengganti pemimpin secara damai juga membantu mencegah konflik seperti revolusi atau kudeta. Selain itu, demokrasi mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, memastikan penggunaan sumber daya negara yang efisien dan efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih tinggi, menandakan dampak positifnya pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, demokrasi memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan masyarakat yang makmur (Mainwaring et al., 2001).

Dalam bukunya "Democracy and Trust", Mark E. Warren mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin dan mengubah pemerintahan secara damai. Warren menyoroti pentingnya kepercayaan antara rakyat dan

pemerintah dalam menjaga kestabilan demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang efektif memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi, di mana rakyat merasa bahwa pemerintah mereka adil, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Kepercayaan ini menjadi pondasi utama bagi kerja sama yang efektif antara warga negara dan pemerintah, yang mendukung keberlangsungan demokrasi yang sehat (Offe, 2007). Sedangkan, Dalam bukunya "Why Politics Matters: Making Democracy Work", Gerry Stoker menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang kompleks dan dinamis. Stoker menegaskan bahwa demokrasi jauh lebih dari sekadar memilih pemimpin melalui pemilihan umum; ia membutuhkan institusi yang kuat untuk berfungsi dengan baik. Lebih dari itu, demokrasi bukanlah pencapaian yang tetap dan pasti, melainkan sebuah proses yang terus-menerus memerlukan usaha dan komitmen dari semua pihak terlibat. Stoker menyoroti bahwa meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem politik terbaik yang ada, keberhasilannya tergantung pada kemauan semua pihak untuk terus memperkuat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan oleh Stoker adalah perlunya kerja keras dan komitmen bersama untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan demokrasi (Goldsmith, 2008).

Dalam karya mereka, Douglass C. North dan Barry R. Weingast membahas tentang dua faktor kunci yang menentukan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pertama, kemampuan pemerintah untuk memonopoli penggunaan kekerasan di dalam negara. Dalam konteks negara yang stabil, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan. Hal ini penting karena memungkinkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan ketertiban, serta melindungi rakyat dari ancaman luar. Kedua, kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat cenderung patuh kepada otoritas pemerintah jika pemerintah dapat menyediakan layanan-layanan seperti keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, jika pemerintah gagal dalam menyediakan layanan-layanan tersebut, maka rakyat dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan bahkan melakukan pemberontakan. Dengan demikian, kedua faktor ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi dengan memastikan otoritas pemerintah yang kuat dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat (North et al., 2009).

Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter mengemukakan bahwa efektivitas pemerintah memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan demokrasi, terutama dalam transisi dari pemerintahan otoriter. Mereka menekankan tiga aspek penting dari efektivitas pemerintah: pertama, membangun konsensus dan legitimasi dengan memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kompromi antara berbagai kelompok masyarakat; kedua, menerapkan kebijakan yang efektif melalui birokrasi yang kompeten dan pengelolaan sumber daya negara yang efisien; dan ketiga, menjaga stabilitas politik dengan menegakkan hukum dan ketertiban, serta mencegah konflik internal seperti kudeta dan pemberontakan. Dengan demikian, efektivitas pemerintah menjadi landasan penting dalam memastikan transisi yang sukses menuju demokrasi yang stabil dan berkelanjutan (MacEwan, 1988).

Chris Rhodes mendefinisikan tata kelola sebagai proses di mana keputusan dibuat dan tindakan kolektif diatur, melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, tata kelola modern cenderung semakin terdesentralisasi dan terhubung, dengan banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Rhodes menekankan bahwa efektivitas pemerintah dalam menjaga kestabilan demokrasi dalam konteks tata kelola modern sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kapasitas pemerintah, kualitas jaringan kebijakan yang terbentuk antara berbagai aktor, dan tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap tata kelola menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi di era kontemporer (Rhodes, 2007).

Dalam Laporan Pembangunan Dunia 2017: Tata Kelola dan Hukum yang diterbitkan oleh Bank Dunia, efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi dibahas dalam beberapa aspek yang saling terkait. Laporan tersebut menyoroti bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi bergantung pada kombinasi faktor-faktor seperti tata kelola yang baik, partisipasi politik yang inklusif, dan kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya. Tata kelola yang baik mencakup

proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, sementara partisipasi politik yang inklusif menciptakan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya menciptakan dasar untuk saling ketergantungan dan kepercayaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi. Dengan demikian, laporan tersebut menekankan pentingnya integrasi berbagai aspek tersebut dalam membangun pemerintahan yang efektif dan memelihara demokrasi yang stabil (“World Dev. Rep. 2017 Gov. Law,” 2017).

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pertama, pentingnya kebebasan dan pemahaman tentang hak berserikat bagi warga negara. Pemerintahan yang efektif harus dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah sangatlah krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ketiga, keberadaan lembaga pemerintahan yang independen dan kuat, seperti sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik, juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi.

Analisis ini menggambarkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, memfasilitasi partisipasi publik, serta memastikan akuntabilitas. Pemerintahan yang efektif harus mampu merespons kebutuhan masyarakat, menangani tantangan dan konflik, serta memelihara integritas institusi pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya-upaya ini akan berkontribusi pada keberlangsungan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.

CONCLUSIONS

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis jurnal ini adalah bahwa efektivitas pemerintahan memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pemerintahan yang efektif harus memiliki kemampuan untuk melindungi hak asasi manusia, memfasilitasi partisipasi publik, dan mempertahankan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan lembaga pemerintahan yang independen dan kuat juga merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan harus menjadi prioritas utama guna memastikan kestabilan demokrasi dan kemajuan masyarakat. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan yang efektif bukan hanya tentang pengelolaan administratif, tetapi juga tentang komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak-hak individu, serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperkuat efektivitas pemerintahan harus menjadi fokus utama dalam upaya menjaga dan memajukan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Efektivitas pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menegakkan hukum, yang merupakan pilar-pilar utama demokrasi.

REFERENCES

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Almond, G. A., & Lipset, S. M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. *American Sociological Review*, 25(5). <https://doi.org/10.2307/2090151>
- Dahl, R. A. (1967). Pluralist Democracy in the United States. In *The Nature of Public Policy*.
- Goldsmith, M. (2008). WHY POLITICS MATTERS: MAKING DEMOCRACY WORK - by Gerry Stoker. *Public Administration*, 86(1). https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00721_6.x
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.

- Leftwich, A. (2000). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. By Larry Diamond. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. Pp. xvi+362. \$49.95 (cloth); \$17.95 (paper). . *American Journal of Sociology*, 106(2). <https://doi.org/10.1086/316974>
- Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. In *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. <https://doi.org/10.2307/3331092>
- MacEwan, A. (1988). Book Review: Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. *Latin American Perspectives*, 15(3).
- Mainwaring, S., Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2001). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. *Latin American Politics and Society*, 43(3). <https://doi.org/10.2307/3177153>
- Maxwell, K., Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1995). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. *Foreign Affairs*, 74(4). <https://doi.org/10.2307/20047256>
- North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. In *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511575839>
- Offe, C. (2007). Democracy and Trust. *Theoria*, 47(96). <https://doi.org/10.3167/004058100782485693>
- Pierre, A. J., & Huntington, S. P. (1992). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. *Foreign Affairs*, 71(2). <https://doi.org/10.2307/20045138>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon und Schuster, 2001. ISBN. *Policy Analysis*, 20.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. *Organization Studies*, 28(8).
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02).
- Smith, R. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. *RUSI Journal*, 157(5). <https://doi.org/10.1080/03071847.2012.733122>
- World Development Report 2017: Governance and the Law. (2017). In *World Development Report 2017: Governance and the Law*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>
- Yin., R. K. (2014). *Case study research design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *Metodología de La Investigación*, 28(March 2016).